

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 14 dan 24 Juni 2021



TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Skors (Penyusunan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi)
4. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
5. Skors (untuk penyusunan jawaban bupati);

6. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 3 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: - orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati

- TAPD Kabupaten Rembang, dan Sekretaris DPRD beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Senin tanggal 14 Juni 2021 kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Pertama DPRD dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dengan keadaan sehat wal'afiat. Semoga atas ridlo-Nya pula, rapat paripurna DPRD hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Amiin.

Peserta rapat yang kami hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 35 orang.

Ketentuan kuorum pelaksanaan rapat paripurna ini, sebagaimana dituangkan pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa rapat paripurna untuk menetapkan perda dan APBD dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.35 WIB, maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta rapat yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan, bahwa pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini adalah tindak lanjut atas :

1. Permohonan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, melalui surat Nomor : 900/1264 tanggal 9 Juni 2021 perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Penyampaian buku-buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada DPRD, melalui surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 900/1266 Tanggal 9 Juni 2021

Perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Pengantar Nota Keuangan, Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran, Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran, serta Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah 2020 audit dari BPK.

3. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Juni 2021, yang telah menetapkan agenda dan jadwal pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Adapun rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna pertama dari dua rapat paripurna yang diagendakan.

Peserta rapat yang kami hormati.

Memperhatikan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD dan TAPD tanggal 10 Juni 2021 dengan merujuk Pasal 11 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Skors (penyusunan pandangan umum fraksi);
4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
5. Skors (penyusunan jawaban bupati);
6. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi;
7. Penutup.

Peserta rapat yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== **PENJELASAN BUPATI** =====

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

➤ (*Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Peserta rapat yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama penjelasan Bupati atas Raperda. Dari penjelasan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi-Fraksi dengan pandangan umumnya. Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada masing-masing Fraksi dalam menyusun pandangan umum dimaksud. Memenuhi keperluan tersebut, maka rapat paripurna saya skors selama 20 menit.

(*Ketuk palu 1 kali*)

Waktu yang diberikan untuk menyusun pandangan fraksi telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

(*Ketuk palu 1 kali*)

Peserta rapat yang berbahagia.

Kita ikuti acara keempat, yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan pandangan umum fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai : Sdr. Muhammad Anshori
Persatuan
Pembangunan
2. Fraksi Partai : Sdr. Supadi
Kebangkitan
Bangsa
3. Fraksi Nasional : Sdr. Khamid, S.E.,Sy.
Demokrat
4. Fraksi PDI : Sdri. Sumarsih
Perjuangan
5. Fraksi Demokrat : Sdr. H. Gunasih,S.E.
Hanura
6. Fraksi Karya : Sdr. Anjar Krisniawan, S.T.
Indonesia Sejahtera

Secara berurutan, selanjutnya dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI =====

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ (*Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Hadirin yang berbahagia,

Dari pandangan umum fraksi-fraksi ini, perlu tanggapan atau jawaban bupati untuk tindaklanjutnya. Atas hal tersebut, maka rapat paripurna saya skors kembali selama 5 menit, untuk memberikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara ke enam yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Kepada Saudara Bupati, disilahkan.

===== JAWABAN BUPATI =====

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

➤ *(Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir)*

Hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala

kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Selanjutnya, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Rembang, dan untuk Rapat Paripurna Kedua jatuh pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021.

Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

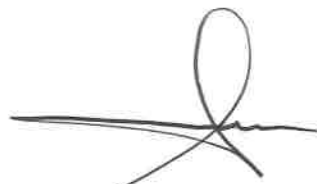
(Ketuk palu 3 kali)

Sekian

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

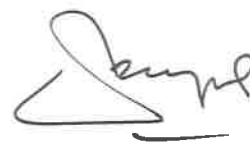
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

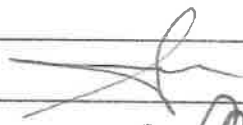

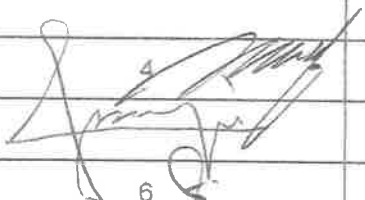
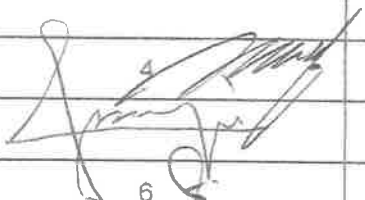
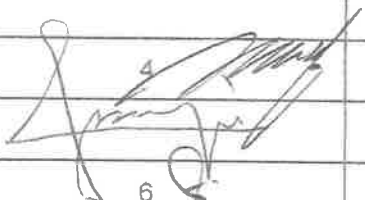
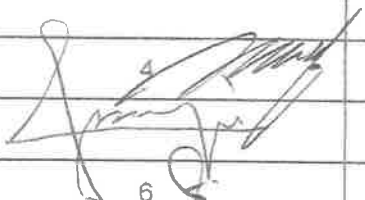




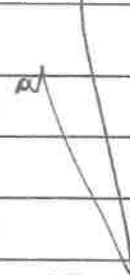



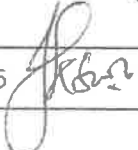











Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pj. Sekda Kabupaten Rembang dan Tim TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

**RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020**

**HARI/TANGGAL : SENIN, 14 JUNI 2021
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3 	
4	SUMARDI	Anggota	4 	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7 	✓
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8 	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9 	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10 	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	MAHMUDI	Anggota	12 	
13	ILYAS	Anggota	13 	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14 	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15 	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16 	
17	SUPADI	Anggota	17 	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18 	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	SUSTIYONO	Anggota	20 	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21 	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22 	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23 	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24 	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25 	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26 	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIWAN, S.T.	Anggota	44
45			45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




DPRD KABUPATEN REMBANG
PERSIDANGAN RAPAT,

**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN PJ SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020**

HARI/TANGGAL : SENIN, 14 JUNI 2021

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
2	EDY SUPRIYANTA, ATD,S.H.,M.M.	Pj. Sekertaris Daerah	2.



Handwritten signature of Drs. DruPodu M.Si

Drs. DRUPODO M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020**

HARI/TANGGAL : SENIN, 14 JUNI 2021

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDY SUPRIYANTA, ATD,S.H.,M.M.	Pj. Sekertaris Daerah	1.....
2		Asisten I Sekda	2.....
3		Asisten II Sekda	3.....
4		Asisten III Sekda	4.....
5	MUSTAR	Ka. BPPKAD	5.....
6	Siti Comindarsih	Ka. BAPPEDA	6.....
7		Kabag. Hukum Setda	7.....
8		Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8.....
9	NURPURNOMO	Kabag. Pemerintahan Setda	9.....
10	Komunika	BPPKAD	10.....
11	Fatma H	BPPKAD	11.....
12	Devy Batiw		12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....



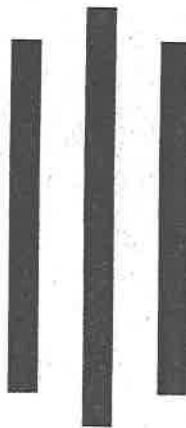
DRS. BRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009



**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini dan di situasi dimana sudah hampir satu tahun lebih kita hidup berdampingan dengan pandemic *covid 19*, kita dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan

dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 .

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dalam pasal 194 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan sebuah kabar yang sangat membahagiakan, membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, karena di penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kita dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.867.686.369.423,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.878.325.919.915,50 atau 100,57%. Untuk Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja dan Transfer, dari yang

direncanakan untuk Belanja sebesar Rp1.493.626.825.553,00 direalisasikan sebesar Rp1.425.834.550.259,20 dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp405.034.971.687,00 direalisasikan sebesar Rp404.941.954.700,00. Sehingga Belanja Daerah yang merupakan total Belanja dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp1.898.661.797.240,00 direalisasikan Rp1.830.776.504.959,20 atau 96,42%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp120.143.795.817,00 realisasinya sebesar Rp68.525.861.116,80 atau 57,04% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp89.168.368.000,00 realisasinya sebesar Rp50.750.095.000,00 atau 56,91%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
4	PENDAPATAN - LRA	1.867.686.369.423,00	1.878.325.919.915,50	100,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	292.142.773.423,00	326.670.124.350,50	111,82
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	80.026.500.000,00	87.544.136.466,00	109,39
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	14.721.396.775,00	16.368.148.360,00	111,19
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.840.309.000,00	11.961.666.343,00	110,34
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	186.554.567.648,00	210.796.173.181,50	112,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.503.947.901.000,00	1.479.953.202.848,00	98,40
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.022.967.423.000,00	1.012.352.994.244,00	98,96
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	20.656.403.000,00	23.701.164.996,00	114,74
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	32.095.314.000,00	29.786.075.922,00	92,81
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	734.621.624.000,00	727.781.396.000,00	99,07
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	235.594.082.000,00	231.084.357.326,00	98,09
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	356.270.479.000,00	356.270.479.000,00	100,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	356.270.479.000,00	356.270.479.000,00	100,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	105.622.999.000,00	97.043.873.316,00	91,88
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	105.622.999.000,00	97.043.873.316,00	91,88
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	19.087.000.000,00	14.285.856.288,00	74,85
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	19.087.000.000,00	14.285.856.288,00	74,85
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	71.595.695.000,00	71.702.592.717,00	100,15
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	71.595.695.000,00	71.702.592.717,00	100,15
5	BELANJA	1.493.626.825.553,00	1.425.834.550.259,20	95,46
5.1	BELANJA OPERASI	1.258.227.812.748,00	1.214.983.893.484,20	96,56
5.1.1	Belanja Pegawai	878.881.728.623,00	850.464.094.909,00	96,77
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	279.892.922.125,00	269.170.333.462,20	96,17
5.1.3	Belanja Bunga	1.631.632.000,00	1.110.103.113,00	68,04
5.1.4	Belanja Subsidi	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
5.1.5	Belanja Hibah	87.141.810.000,00	83.857.142.000,00	96,23
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.079.720.000,00	3.782.220.000,00	92,71
5.2	BELANJA MODAL	178.039.753.002,00	154.123.440.858,00	86,57
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.677.159.913,00	60.547.171.479,00	95,08
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.843.156.720,00	47.709.319.083,00	90,28
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.475.260.469,00	42.270.452.676,00	73,55
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.044.175.900,00	3.596.497.620,00	88,93
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	57.359.259.803,00	56.727.215.917,00	98,90
5.3.1	Belanja Tak Terduga	57.359.259.803,00	56.727.215.917,00	98,90
6	TRANSFER	405.034.971.687,00	404.941.954.700,00	99,98
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	12.357.333.100,00	12.357.333.100,00	100,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.052.225.000,00	10.052.225.000,00	100,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.305.108.100,00	2.305.108.100,00	100,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	392.677.638.587,00	392.584.621.600,00	99,98
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	391.485.602.600,00	391.485.602.600,00	100,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.192.035.987,00	1.099.019.000,00	92,20
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.975.427.817,00)	47.549.414.956,30	(153,51)
7	PEMBIAYAAN			
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.143.795.817,00	68.525.861.116,80	57,04
7.1.1	Penggunaan SILPA	40.143.795.817,00	40.143.475.816,80	100,00
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	80.000.000.000,00	28.382.385.300,00	35,48
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	89.168.368.000,00	50.750.095.000,00	56,91
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	83.868.368.000,00	45.450.095.000,00	54,19
	PEMBIAYAAN NETTO	30.975.427.817,00	17.775.766.116,80	57,39
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	65.325.181.073,10	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang

semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tahun depan kita dapat, dan harus dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang dan situasi pandemi wabah *Covid19* ini dapat segera reda di Negara kita Indonesia, khususnya di Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Rembang,
BUPATI REMBANG



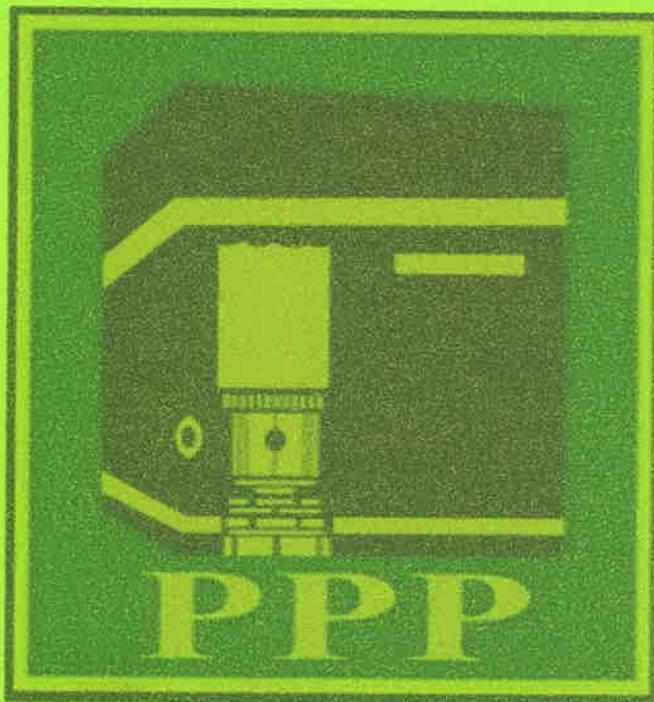
ABDUL HAFIDZ

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2020
KABUPATEN REMBANG**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : Senin, 14 juni 2021

Dibacakan : "SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd. "

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Senin , 14 Juni 2021

Dibacakan oleh : Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani, S.Pd.

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- => Sdr Staf Ahli , Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan , Kepala Dinas ,
Kepala Kantor, Kepala Bagian dan para Camat di lingkungan Kab. Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan semua hadirin yang
berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI , atas limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang baik ini , meskipun sudah agak terlambat , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan Selamat hari raya Fitri 1442 H, Minal a'idin wal faizin , mohon maaf lahir dan bathin atas semua kesalahan dan khilaf yang pernah ada.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2020, yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna I, beberapa saat yang baru lalu , pada hari ini juga , tanggal 14 Juni 2021 , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , yang telah bekerja keras , sehingga dari hasil Pemeriksaan audit BPK Nomor : 53.B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 , Tanggal 18 Mei 2021 , atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 , berhasil mendapatkan predikat Opini WTP yang ke tiga kalinya. Kami juga memberikan apresiasi , atas peningkatan capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 , yakni mencapai 96.42 % , progress tersebut sudah meningkat capaiannya, meskipun hanya sedikit , dibanding dengan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yaitu hanya sebesar 96.04 % .

Sampai saat ini , kita menyadari bahwa , masih ada beberapa hal yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , tetap selalu memberikan dorongan dan dukungan , dengan harapan agar, untuk capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun berjalan ini, dapat meningkat lebih baik lagi . Meskipun kita sudah hampir satu setengah tahun berjalan, dan sampai saat ini masih disibukkan dengan penanganan pandemic Covid-19 , sampai kapan berakhirnya tidak kita ketahui, semoga saja pandemic covid ini segera berakhir , sehingga apa yang

menjadi harapan warga masyarakat Rembang , dapat segera tercukupi kesejahteraannya.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati...,

Setelah kami mencermati Penjelasan sdr. Bupati , dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK , atas Systeem Pengendalian Interen dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan , yang disajikan dalam Laporan Nomor : 53.B/LHP/XVIII.SMG/05/2021, Tanggal 18 Mei 2021 . Terkait dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan beberapa catatan dari Resume Temuan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai berikut :

1. Pengendalian atas Pengelolaan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang , di Kawasan Rekreasi Pantai Kartini , belum Memadahi . Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mendorong dan meminta , agar Pemkab Rembang melakukan Penanganan yang lebih serius dan langkah-langkah strategis .
2. Pertanggungjawaban Belanja Hibah , Bantuan Sosial , dan Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran 2020, Terlambat disampaikan sebesar Rp. 6.492.841.850,00 dan yang belum disampaikan sebesar Rp. 3.645.500.000,00 Kami mohon agar segera ditindak lanjuti .
3. Pencatatan Persediaan Pengiriman barang, dan pengambilan Pemakaian Barang tidak tertib , dan terdapat selisih atas Pengadaan Aspal sebesar Rp. 655.569.680,00 Mohon Penjelasannya .
4. Pertanggungjawaban Belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup , Tidak Sah dengan jumlah sebesar Rp. 362.975.994,00 Mohon segera diselesaikan .
5. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sale – desa Tahunan Kecamatan Sale , pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang , dengan jumlah sebesar Rp. 18.970.817,77 Mohon segera ditindak lanjuti .
6. Pengendalian atas Pengelolaan Kas Daerah , belum sepenuhnya Memadahi .
7. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah kabupaten Rembang , Belum Tertib . Mohon agar ditingkatkan Pengelolaannya dengan memenuhi administrasi sesuai dengan ketentuanyang ada .
8. Silpa Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 65.325.181.073,10 atau sebesar 3,48 % , ini termasuk kategori tinggi , Mohon agar Pemkab Rembang meningkatkan kinerjanya , supaya Ke depan Silpa bisa ditekan lebih kecil lagi.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2020 ini , dan selanjutnya untuk dilakukan pembahasan oleh Banggar dan TAPD.

Ahirnya mari kita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga upaya dan usaha kita, mandapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh....

Rembang , 14 Juni 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

MUNTHOHID , SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI , SPdi



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS

RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA.2020

Disampaikan oleh :.....
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Senin, 14 Juni 2021

Assalamu 'alaikumwb.wb.

Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami hormati, segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang

Yang kami hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang,
beserta segenap Anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan
Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di Lingkungan Pemkab Rembang serta Para
Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang *Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020* dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Tentu kami, FPKB menyetujui apabila Raperda ini segera dibahas melalui mekanisme rapat-rapat berikutnya di DPRD sehingga hasilnya bisa menjadi sarana evaluasi diri bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang, untuk menjadi motivasi peningkatan kualitas kinerja dan hasil kerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya FPKB memberikan apresiasi kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2020. Tentu hal ini merupakan capaian yang membanggakan dan harus selalu dipertahankan pada masa-masa yang akan datang.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang Tanggal 14 Junii 2021, FPKB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang mana berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan APBD

TA. 2020 pada umumnya dapat berjalan lancar. FPKB berharap semoga capaian ini bisa lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang.

Namun perlu juga kami sampaikan, menurut hemat kami jalannya pemerintahan dan APBD yang baik tidak hanya diukur dari angka-angka realisasi dan penyerapan anggaran saja. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebagai indikator kualitas pelaksanaan APBD seperti: ketertiban, ketaatan pada aturan perundang-undangan, efektifitas, efisiensi, ekonomisasi, transparansi, pertanggungjawaban, keadilan lain-lain. Maka dari itu FPKB merasa perlu memberikan catatan-catatan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Berikut ini catatan-catatan yang kami berikan atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 :

1. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), FPKB menilai apabila dilihat dari sisi angka realisasi sebesar Rp. 326.670.124.350,- memang cukup bagus karena mampu melampaui target yang telah direncanakan sebesar 111,82% dari anggaran sebesar Rp. 292.142.773.423,-. Dan meningkat sebesar Rp. 18.224.635.213,- dibandingkan realisasi TA. 2019 sebesar Rp. 308.445.489.137,-. Namun apabila dilihat dari sumbernya, FPKB prihatin karena peningkatan PAD TA. 2020 ini lebih banyak bersumber dari pendapatan BLUD RSUD. Dr. R. Soetrasno dan 16 BLUD puskesmas yang terealisasi sebesar Rp. 197.926.710.276,- atau 110,83% dari anggaran sebesar Rp. 178.582.602.600,- meningkat sebesar Rp. 37.951.937.817,- bila dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 159.974.772.459,-. Dengan kata lain peningkatan PAD ini terjadi karena momentum banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan jasa kesehatan. Sementara PAD yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi Daerah TA. 2020 yang idealnya harus mengalami peningkatan dari tahun ketahun bila disandingkan dengan realisasi pajak dan retribusi Daerah TA. 2019 justru mengalami penurunan realisasi pajak sebesar Rp. 13.151.095.432,- dan penurunan realisasi retribusi sebesar Rp. 2.665.851.430,- atau total Rp. 15.816.946.862,-. Memang FPKB

yakin bahwa hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi Perekonomian Daerah. Namun kami berharap dan mendukung pemkab untuk lebih kreatif menggali potensi sumber PAD dari sektor pajak dan retribusi serta meminimalisir kebocoran-kebocorannya. Adanya informasi yang kami terima dari beberapa sumber tentang banyaknya nelayan yang menjual ikan di luar TPI atau melelang ikan di TPI luar daerah adalah salah satu contoh hilangnya potensi pendapatan daerah yang harus disikapi oleh Pemkab Rembang.

2. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, FPKB mencermati beberapa Perusda yaitu :Perumda Air Minum Banyu milik dengan nilai investasi pemkab sebesar Rp. 20.188.042.483,-dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan nilai investasi pemkab sebesar Rp. 29.902.957.305,-. Dalam beberapa tahun ini, keduanya tidak menyetorkan dividen kepada Pemkab Rembang. Maka, FPKB memandang Pemkab perlu melakukan kajian yang komprehensif untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dalam menangani keduanya. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung-jawab Pemkab terhadap aset-asetnya dan agar keduanya tidak menjadi isu negative yang berkembang liar di masyarakat.
3. Terkait Realisasi Belanja Modal TA. 2020 sebesar Rp. 154.123.440.858,- atau 86,57% dari anggaran sebesar Rp. 178.039.753.002,-atau menurun sebesar Rp. 52.947.988.521,-di bandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 207.071.429.379,- tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Belanja modal yang out comenya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan mempunyai inpact yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi seharusnya mendapatkan prioritas utama dalam realisasinya. Besarnya anggaran belanja modal dan tingginya realisasi mencerminkan APBD yang sehatdan ideal. Maka, FPKB berharap dikemudian hari Pemkab Rembang lebih serius dalam optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal, karena dari sinilah keberpihakan APBD pada kepentingan rakyat akan diukur.

4. Menyimpang dari pelaksanaan APBD 2020, mencermati peningkatan pandemi Covid-19 akhir-akhir ini sehingga Kabupaten Rembang masuk dalam kategori zona merah, FPKB mendukung Pemkab Rembang untuk membuat kebijakan-kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penanggulangan penyebaran Covid -19 di Kabupaten Rembang. Sosialisasi secara kontinyu dan penegakan disiplin Protokol kesehatan pada masyarakat mutlak diperlukan. Kami memahami tentu ini menjadi serba susah bagi kita, namun kami berpegangan pada Kaidah Fiqih “Dar’ul Mafasid Muqoddamun ‘AlaJalbilmasholih”, “Menolak kemafsadahan atau kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Semoga Pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga kita bisa kembali beraktifitas secara normal seperti sediakala.

Demikian Pandangan Umum FPKB terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini kami sampaikan, FPKB setuju agar Raperda ini segera dibahas dan akhirnya kami ucapkan terimakasih atas perhatian hadirin sekalian.

AkhirulKalam Wallahulmuwaffiq ilaaqwamitthoriq
WassalamualaikumWr. Wb

Rembang, 14 Juni 2021
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG



Ilyas
Ketua



Nasirudin, S.Si
Sekretaris



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Saudara Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami Fraksi NasDem menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Belanja Subsidi kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam rangka Penugasan untuk penyaluran pinjaman lunak bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagai penanganan dampak ekonomi Covid-19 di Kabupaten Rembang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000.000,00 pelaksanaan programnya seperti apa? Mohon penjelasan.
2. Perekonomian Kabupaten Rembang selama selang tahun 2017- 2020 menunjukkan *trend* penurunan, dan pertumbuhan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut yaitu 6,98 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2020 menurun menjadi -1,49 persen. Mohon penjelasan terkait pertumbuhan ekonomi 2020 yang menurun dan apa program Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang menurun tersebut?
Mohon masalah pertumbuhan ekonomi yang menurun -1,49 persen ini untuk ditangani dengan baik.
3. Mengacu pada kebijakan baru dari Kementerian Keuangan tentang penggunaan dana DBHCHT, mohon penggunaannya difokuskan untuk mendanai bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan.
4. Realisasi anggaran tidak sesuai rencana, masih telat dan tidak tepat waktu sehingga outcome dan impactnya kurang efektif. Dalam realisasi perlu ada peningkatan, tertib anggaran dalam proses perencanaan, dan tepat waktu dalam realisasi.
5. Pada masa pandemi covid-19, saat ini Kabupaten Rembang menjadi daerah zona merah, maka penggunaan APBD harus memprioritaskan pelayanan kesehatan, pelayanan publik, menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan secara efektif dan efisien.

6. Kami berharap penggunaan APBD tahun 2021 nantinya dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang serta dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi/misi pemerintah daerah kabupaten Rembang.
7. Pembangunan di Kabupaten Rembang kedepannya harus berjalan lebih baik lagi, terutama dalam membangun fasilitas publik seperti jalan. Maka untuk itu perlu melakukan optimalisasi anggaran pembangunan jalan agar kondisi jalan yang sudah lama rusak atau berlubang segera teratasi.

Demikian Pandangan Umum ini kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 14 Juni 2021

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



H. MASHADI, S.Pd., M.M.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212 Telp. (0295) 6911494



PANDANGAN UMUM FRAKSI

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang**

Atas Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2020

Hari / Tanggal : Senin / 14 Juni 2021

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Yang terhormat, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang,

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini, marilah kita bersama mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Secara umum, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah dicapai pada Tahun 2020, meskipun sudah tiga kali berturut-turut dapat mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), semoga kedepannya kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terus ditingkatkan.

Terkait dengan Realisasi penyerapan anggaran Belanja, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mengoptimalkan kinerja OPD-OPD terkait untuk penyerapan anggaran tersebut, sehingga tidak terjadi keterlambatan penyerapan.

Berikutnya, kami meminta agar orientasi anggaran belanja untuk bidang Kesehatan saat ini dapat di optimalkan, mengingat saat ini kita masih berada dalam situasi Pandemi *Covid-19*. Harapan kami, Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menambah fasilitas-fasilitas penunjang Kesehatan, seperti penambahan tempat isolasi

mandiri, pengadaan SWAB dan RAPID test yang lebih sering dan merata, serta memaksimalkan pemerataan vaksinasi di Wilayah Kabupaten Rembang. Yang terakhir lebih mensosialisasi masyarakat akan bahaya dan dampak yang timbul jika melanggar protokol kesehatan yang sudah diterapkan, bila perlu pemberian sanksi bagi pelanggar aturan protokol kesehatan, dengan begitu kita bersama dapat menekan angka penyebaran *Covid-19* yang saat ini berangsur naik di wilayah Kabupaten Rembang.

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktivitas ditengah situasi pandemic wabah *Covid-19* ini, serta tak lupa untuk terus berdo'a agar situasi pandemic wabah *Covid-19* ini segera berakhir.

Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



Sekretaris

JASMANI

WIDODO, SH

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**



**DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, SENIN 14 JUNI 2021
DIBACAKAN OLEH : GUNASIH, SE**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT – HANURA

ATAS

**RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2020**

SENIN, 14 JUNI 2021

DIBACAKAN OLEH : MUGIARTO S.T

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati,

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab. Rembang
3. FORKOPIMDA Kab. Rembang
4. Saudara PJ. Sekertaris Daerah Kab. Rembang
5. Saudara Sekertaris DPRD Kab. Rembang Beserta Staf
6. Saudara Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan2 wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan Fraksi ini marilah kita semua memanjatkan Pujidan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan berkah kepada kita semua sehingga kita bias hadir mengikuti persidangan yang berbahagia ini.

Kami juga tidak bosan – bosannya mengajak hadirin berdoa supaya virus Covid-19 ini segera hilang dari muka bumi pertiwi ini. Semoga warga rembang selalu di lindungi dari segala penyakit dan wabah covid ini, aminn

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi Demokrat – Hanura menyampaikan terima kasih kepada saudara bupati yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah dengan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kab. Rembang tahun anggaran 2020. Setelah mendengar penjelasan saudara Bupati secara umum pelaksanaan berjalan dengan baik dan telah memenuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat di lanjutkan pembahasan dalam rapat – rapat selanjutnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa catatan dan masukan demi perbaikan kedepan

Ada beberapa catatan catatan yang akan kami sampaikan antara lain:

1. IPM kabupatn Rembang berada di angka 70,02 berada hanya di atas kab Blora namun di bawah kab. Pati dan Jepara. Perlu perhatian yang serius mengingat proporsi belanja pendidikan, kesehatan, di rembang sudah berada di atas yang diwajibkan pemerintah pusat , sehingga seharusnya lebih tinggi lagi
2. Dilihat dari struktur APBD TA 2020 dan realisasinya menunjukkan angka yang menggehirkan , terutama capain pendapatan daerah semua berada di atas 100% namun demikian kalau kita menengok kebelakang ke perubahan APBD 2020 terdapat penurunan target pendapatan yang sangat drastis yaitu PAD turun 4,92% , pajak daerah turun 20,39%,

retribusi daerah turun 36,14%. Sehingga pencapaian tahun 2020 ini tidak bisa menjadi ukuran tingkat keberhasilan .

3. Kami memberi apresiasi yang luar biasa kepada Pemkab. Rembang bahwa tahun 2020 kab Rembang mendapatkan dana DID dengan jumlah fantastik yaitu 91m, itu di usahakan sampai berdarah darah dan nabrak nabrak ketentuan yang ada. Akan tetapi perjuangan itu terasa sia sia dikarenakan penggunaan anggarann itu banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan yang sudah diatur di permen sehingga berakibat tahun ini kab. Rembang hanya dapat 7m (terjun bebas}.
4. Dalam hal Refocusing anggaran tahun 2020 terkait adanya wabah covid 19 kami melihat pemda kab. Rembang seolah aji mumpung sehingga anggaran anggarann yang ada banyak untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya kurang ada kaitanya dengan penanggulangan covid 19. Karena di rembang perubahan anggaran refocusing sangat banyak sehingga di pakai kegiatan yang lain lain.
5. Kami fraksi demokrat hanura menyoroti terkait THL yang sangat banyak dan tersebar di semua OPD akan tetapi dengan banyaknya tenaga THL itu tidak di sertai dengan peningkatan pelayanan atau peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
6. Catatan terakhir dari kami bahwa perolehan WTP saat ini kita harus syukuri, ini sebagai usaha pemerintah kab Rembang bersama sama dengan semua elemen terkait. Akan tetapi walau sudah WTP tidak berarti tidak ada catatan catatan, kami melihat ada beberapa catatan dari BPK yang sifatnya harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,

Bupati, Wakil Bupati dan rapat paripurna dewan yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat – Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan Terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat Bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Rembang, 14 Juni 2021

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



MUGIARTO S.T

SEKRETARIS



DUMADIYONO, S.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Jl. Diponegoro No 88 Rembang Telp 693290

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**ATAS
PENGANTAR NOTA KEUANGAN BUPATI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KAB. REMBANG TA 2020**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Senin, 14 Juni 2021**

JURU BICARA: ANJAR KRISNIAWAN. ST

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Rembang, serta para hadirin semua.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Dalam kesempatan ini kami mengungkapkan keprihatinan sangat mendalam atas situasi negara saat ini yang sedang mengalami musibah pandemi covid_19 sejak awal tahun 2020. Bahkan Kabupaten Rembang masuk kategori zona merah, data per 13 Juni 2021 menyebutkan 4345 orang terkonfirmasi positif, 351 orang meninggal dunia dan kasus aktif masih tinggi yakni 504 orang tersebar di berbagai tempat isolasi. Sampai-sampai harus menggunakan kamar kamar di Hotel Puri Indah untuk ruang isolasi khusus lantaran fasilitas kesehatan yang ada sudah tidak bisa menampung lagi . Mudah-mudahan cobaan ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana sebaiknya dengan tetap mentaati protokol kesehatan pencegahan covid_19. Jangan kendor.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah kita ikuti Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang baru saja disampaikan oleh Saudara Bupati, tibalah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera sebagai berikut:

- Secara umum pelaksanaan APBD 2020 telah berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih terhadap jajaran pemerintahan serta seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.
- Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga pada tahun anggaran 2020 mendapat predikat WTP (wajar tanpa perkecualian) untuk yang ketiga kalinya. Artinya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) meyakini Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Semoga prestasi ini bisa kita tingkatkan dimasa yang akan datang. Tentu dengan beberapa evaluasi pada sektor demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
- Namun ada hal yang kami sayangkan, yakni dengan predikat WTP ini tidak ada lagi keharusan pembahasan di DPRD mengenai LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK. Sehingga kami tidak mengetahui secara persis seberapa jauh predikat WTP tersebut maupun apa saja yang menjadi rekomendasi BPK kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk itu kami mohon diwaktu mendatang tetap diadakan pembahasan LHP walaupun dengan opini WTP, karena hal tsb merupakan fungsi pengawasan DPRD.
- Dari sisi pendapatan daerah kita bisa mencapai target penerimaan yakni 100,57 %, dari rencana Rp. 1.867.686.369.423,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. ~~1.878.325.918,50~~ ^{1.878.325.919.915,50}. Lebih menggembirakan lagi PAD (pendapatan asli daerah) dari rencana Rp. 292.142.773.423,00 bisa terealisasi sebesar Rp. 326.670.124.350,50 atau 111,82 %. Harapan kami pada tahun mendatang kita bisa melampaui target pendapatan, terutama pendapatan asli daerah. Untuk itu, kami sangat mendukung

upaya BPPKAD maupun OPD yang lain untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

- Mengenai DID (dana insentive daerah), kami berpendapat rendahnya alokasi DID yg diberikan pemerintah pusat sebagai reward atas opini WTP, menunjukkan Pemkab Rembang kurang konsen terhadap poin-poin yang merupakan parameter pemberian DID. Mohon penjelasan!
- Ada satu hal yang masih membuat kami kecewa yakni angka SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) dalam pelaksanaan APBD TA 2020 sebesar Rp. 65,3 milyar lebih, padahal tahun lalu hanya Rp 35 milyar. Mohon penjelasan!
- Banyaknya rangkap jabatan dan plt di lingkup Pemkab Rembang menandakan adanya tata kelola pemerintahan yang tidak pro pelayanan kepada rakyat. Mohon penjelasan !
- Mencermati kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai prioritas pembangunan yg ditetapkan dalam RKPD 2020 maka terdapat prioritas pembangunan yg tidak tercapai yakni peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya IPM (indeks pembangunan manusia) pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 0,13% dari angka 70,15 pada tahun 2019 turun ke angka 70,02 pada tahun 2020. Bagaimana agar Pemerintah Kabupaten Rembang lebih fokus lagi terhadap bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat ini, mohon penjelasan.
- Masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sebesar 15,6 %, relatif masih tinggi dan belum memenuhi target, untuk itu diperlukan evaluasi secara komprehensif.
- Hampir semua OPD melaporkan capaian kegiatan dan serapan anggaran lebih dari 90 %. Tapi ternyata hal ini tidak memberikan

dampak yang signifikan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Rembang, terlihat dari belum tercapainya beberapa indikator utama yakni kemiskinan, pengangguran, daya beli, dan nasib petani dan nelayan. Ini menandakan Pemkab abai dan tidak serius dalam dalam penggunaan anggaran. Mohon penjelasan !

- Petani kembali menjerit dan menderita. Harga gabah saat panen jatuh dan pupuk sulit didapat saat masa tanam bisa kembali terulang. Pemkab seperti lepas tangan. Mohon penjelasan !
- Perencanaan anggaran dengan tanpa prioritas menyebabkan tidak jelasnya capaian hasil atas pembangunan. Ini menandakan Pemkab tidak peka dengan permasalahan yang ada sehingga pembangunan berjalan apa adanya, tanpa kejelasan arah dan tujuan. Mohon penjelasan !
- Tercapainya target investasi di Rembang (Rp. 9 T) ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, bahkan angka kemiskinan cenderung naik. Ini menandakan bahwa Pemkab tidak cermat menentukan bentuk investasi yang dibutuhkan di Rembang. Mohon penjelasan!
- Rencana pembangunan Pasar Kota Rembang selalu menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. Ini menandakan Pemkab kurang matang dan tegas dalam perencanaan tata kota. Mohon penjelasan !
- Masih adanya keluhan dari para nelayan atas rumitnya pengurusan surat menyurat kapal, serta masih tertundanya pembayaran hasil lelang, yang menyebabkan kerugian keuangan para nelayan, menandakan Pemkab tidak serius dalam memperjuangkan nasib para nelayan, padahal mereka telah memberikan kontribusi retribusi yang tidak sedikit kepada Pemkab. Mohon penjelasan !
- Adanya pengurangan penerima bantuan sosial , ekonomi, dan kesehatan dari pemerintah yg tdk diiringi dengan penjelasan dari

desa, mengesankan adanya ketidakadilan, yang menimbulkan banyak pertanyaan dan ke Gundahan di masyarakat. Mohon penjelasan !

- Padamnya lampu penerangan jalan di Jl. Pemuda sangat membahayakan pengguna jalan, dan blm adanya perbaikan atas hal itu. Mohon solusinya !
- Adanya BUMD yang belum setor deviden padahal modal usaha BUMD tersebut dana APOBD yang tidak lain uang rakyat. Hal ini menandakan tata kelola perusahaan yang tidak sehat atau tidak produktif dan tidak berpihak kepada rakyat. Mohon penjelasan !
- Dibidang infrastruktur, masih belum tercapainya kondisi jalan tanpa lubang di Kabupaten Rembang saat ini menjadi kendala tersendiri, karena jalan merupakan salah satu pendukung untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi sistem peningkatan dan pemeliharaan jalan agar penataan jalan bisa lebih baik. Petanyaan kami, bagaimana strategi terbaik agar kondisi jalan di Kabupaten Rembang bisa dalam kondisi baik?
- Kita prihatin terhadap kondisi sungai Babagan Lasem, karena terjadi pencemaran. Sungai penuh dengan sampah plastik, ada kasur, kemungkinan juga ada limbah industri dan lain sebagainya. Sepertinya Pemerintah belum bisa mengatasi problem kebersihan lingkungan sehingga Kabupaten Rembang belum bisa mendapatkan Penghargaan Adipura. Diperlukan program terobosan agar bisa mrnjadikan lingkungan yang bersih serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi problem tersebut?
- Berkaitan dengan Program Lasem Kota Pusaka, mohon penjelasan progres penataan kawasan Lasem kota pusaka, karena kita sudah melihat para pedagang sudah membongkar semua barang dagangannya dan pembangunan di Terminal Lasem akan digunakan untuk apa?

- Pada sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Justru dimasa pandemi kita mendapati merebaknya tempat2 hiburan illegal, salah satunya di sepanjang jalan raya di antara desa Landoh - Sulang. Hal ini mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Semestinya segera diambil tindakan tegas untuk mengantisipasi penyebaran covid serta penyebaran penyakit masyarakat. Mohon penjelasan
- Meledaknya kasus Covid 19 yang tidak diimbangi dengan ketercukupan bantuan logistik kepada mereka yang isolasi menandakan Pemkab kurang tanggap atas bencana pandemi yang ada. Mohon penjelasan !
- Ini yang ditunggu tunggu masyarakat Rembang. Mohon keterangan sejelas jelasnya mengenai kelangsungan Pelabuhan “Tanjung Bonang” di Sluke.
- Terakhir kami berharap, setiap perencanaan proyek atau kegiatan hendaknya disusun secara matang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara proyek atau kegiatan tsb. sehingga tidak terjadi proyek atau kegiatan yang mangkrak. Disamping itu perencanaan yang kurang matang mengakibatkan proyek atau kegiatan-kegiatan yang numpuk di akhir tahun anggaran sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera, selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA 2020 ini akan dibahas dalam Rapat-rapat Komisi bersama OPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Sebelum turun dari mimbar ini kami akan sampaikan sebuah piweling yang kiranya masih relevan, sbb.

“Lamún sirå darbé penguwåså åjà sirå lurus alêman, jalaran iku mau bakål kêtêmu pituwásé kang ora prayogå”. Artinya: “Kalau engkau menjadi penguasa janganlah hanya ingin dipuji - puji saja, sebab hal yang demikian itu akibatnya tidak baik”.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,

AGUS SUTRISNO



Sekretaris,

PUDJI SANTOSA, SP, MH

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1.	Agar pemerintah kabupaten Rembang melakukan Pengendalian atas pemanfaatan kawasan taman kartini	<p>1. Terimakasih atas koreksinya bahwa Terhadap pengelolaan Aset taman kartin Pemkab Rembang telah melakukan langkah tindak lanjut yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset yang ada di taman kartini sedang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan di SIMDA BMD - Setelah itu akan di tentukan bentuk pemanfaatannya
2.	Pertanggungjawaban Belanja Hibah , Bantuan Sosial , dan Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran 2020, Terlambat disampaikan	2. Pasca penyerahan LHP BPK RI, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengirimkan semua pertanggungjawaban yang belum disampaikan ke BPK melalui Inspektorat Kabupaten Rembang, yang selanjutnya telah disampaikan ke BPK RI.
3	Pencatatan Persediaan Pengiriman barang, dan pengambilan Pemakaian Barang tidak tertib dan terdapat selisih atas Pengadaan Aspal	Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DPUTARU telah menyetorkan ke kas daerah sebelum terbitnya LHP BPK RI.
4	Agar segera diselesaikan Pertanggungjawaban Belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup yang Tidak Sah	Sudah ditindaklanjuti dan disetorkan ke kas daerah oleh DLH sebelum terbit LHP BPK RI
5	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sale – desa Tahunan Kecamatan Sale , pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DPUTARU telah menyetorkan ke kas daerah sebelum terbitnya LHP BPK RI.
6	Penatausahaan Aset Tetap yang belum tertib	Pemerintah Kabupaten Rembang akan segera menindaklanjuti temuan BPK dengan penertiban terhadap aset tetap tersebut. Adapun langkah yang akan segera diambil adalah, memerintahkan kepada seluruh Kepala OPD untuk melengkapi catatan asset tetap yang ada di SIMDA BMD.
7	Untuk menekan Silpa lebih kecil, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar meningkatkan kinerjanya.	Akan kami perhatikan, dan akan kami siapkan langkah-langkah tindak lanjutnya.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
1.	<p>Peningkatan PAD pada tahun 2020 lebih banyak bersumber dari pendapatan BLUD, dan Adanya informasi yang kami terima tentang banyaknya nelayan yang menjual ikan di luar TPI atau melelang ikan di TPI luar daerah.</p>	<p>a Pemerintah Kabupaten akan berupaya untuk selalu meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).</p> <p>Target retribusi TPI tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.936.103.600,00 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.170.875.749,00 (Sembilan milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau tercapai sebesar 115,56%. Kondisi tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Rembang mengambil kebijakan untuk meringankan beban para pelaku usaha akibat dampak Covid-19 dengan tidak memungut retribusi selama 2,5 (dua setengah) bulan dimulai dari tanggal 15 April hingga 30 Juni 2020 sehingga berdampak pada penerimaan retribusi tahun 2020. Adapun untuk penanganan hasil tangkapan nelayan yang dijual diluar TPI telah dilakukan penertiban secara gabungan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Satpol Air Polres Rembang dan Komandan Pos TNI AL secara rutin serta meningkatkan pelayanan TPI kepada nelayan.</p>
2.	<p>Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, FPKB mencermati beberapa Perusda yaitu: Perumda Air Minum Banyumili dengan nilai investasi Pemkab sebesar Rp. 20.188.042.483,- dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan nilai investasi Pemkab sebesar Rp. 29.902.957.305,-. Dalam beberapa tahun ini, keduanya tidak menyetorkan dividen kepada Pemkab Rembang. Maka, FPKB memandang Pemkab perlu melakukan kajian yang komprehensif untuk mengambil langkah-langkah</p>	<p>2. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan kajian yang komprehensif berkaitan dengan operasional Perumda Air Minum Banyumili dan PT RBSJ. Namun perlu kami jelaskan sebagai berikut :</p> <p>Perumda Air Minum Banyumili dan PT RBSJ, sudah memperoleh laba pada tiap tahun berjalan, akan tetapi laba tersebut digunakan untuk menutup akumulasi kerugian tahun sebelumnya. Untuk Perumda Air Minum Banyumili, diperkirakan akumulasi kerugian akan tertutup semuanya pada tutup buku tahun 2021, sehingga Perumda Air Minum Banyumili akan memberikan deviden pada tutup buku tahun 2022.</p> <p>Untuk PT RBSJ, peningkatan pendapatan</p>

	<p>yang strategis dalam menangani keduanya. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawab Pemkab terhadap aset-asetnya dan agar keduanya tidak menjadi isu negatif yang berkembang liar di masyarakat</p>	<p>yang signifikan agar dapat memberikan deviden adalah melalui pengusaha jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang terminal Sluke.</p>
3.	<p>Terkait belanja modal agar lebih serius optimalisasi penyerapan anggaran belanja.</p>	<p>3. Prosentase belanja modal sebesar 86,57 % dari total Belanja Daerah hal ini disebabkan oleh proses pengadaan melalui mekanisme lelang antara pagu anggaran dengan RAB yang dibayarkan sesuai dengan hasil lelang.</p>
4.	<p>Pemkab Rembang untuk membuat kebijakan-kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Rembang. Sosialisasi secara kontinyu dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat mutlak diperlukan. Kami memahami tentu ini menjadi serba susah bagi kita, namun kami berpegangan pada Kaidah Fiqih "Dar'ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masholih", "Menolak kemafsadahan atau kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Semoga Pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga kita bisa kembali beraktifitas secara normal seperti sedia kala.</p>	<p>4. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun Keputusan Bupati Rembang tentang Rencana Aksi Penanggulangan dan Penyebaran Covid 19, terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Bidang Kesehatan - Bantuan Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi - Penyediaan Jaring Pengaman Sosial <p>Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyediakan Fasilitas Isolasi Mandiri Terpusat.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI NASDEM	
1.	Belanja Subsidi kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam rangka Penugasan untuk penyaluran pinjaman lunak bagi Usaha Mikro dan Koperasi sebagai penanganan dampak ekonomi Covid-19 di Kabupaten Rembang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000.000,00 pelaksanaan programnya	1 Dengan subsidi tersebut, BPR BKK Lasem meluncurkan skema pinjaman kepada usaha mikro dan koperasi dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- dan bunga 0% serta biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp. 0,- Sasaran 11ribu usaha mikro/ koperasi dan target pinjaman Rp. 55 M
2.	Perekonomian Kabupaten Rembang selama selang tahun 2017- 2020 menunjukkan trend penurunan, dan pertumbuhan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut yaitu 6,98 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2020 menurun menjadi -1,49 persen. Mohon penjelasan terkait pertumbuhan ekonomi 2020 yang menurun dan apa program Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang menurun tersebut?	2 Pertumbuhan ekonomi yang menurun pada tahun 2020, disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan yang luar biasa terhadap aktivitas ekonomi di segala bidang. Pertumbuhan ekonomi pada tingkat wajar akan terjadi apabila aktivitas ekonomi dapat berjalan normal pada situasi pandemi (New normal ekonomi) hal ini dapat dilakukan dengan strategi peningkatan aktivitas ekonomi bidang kesehatan, bidang teknologi informasi dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
3.	Mohon penjelasan terkait kegiatan yang sumber dananya dari DBHCHT untuk apa saja	3 Dana DBHCHT untuk tahun 2020 dianggarkan untuk 4 program, yaitu : Program peningkatan kualitas bahan baku; Program pembinaan lingkungan social, meliputi kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi; Program sosialisasi ketentuan cukai; Program pemberantasan barang kena cukai illegal.
4.	Realisasi anggaran tidak sesuai rencana, masih telat dan tidak tepat waktu sehingga outcome dan impactnya kurang efektif. Dalam realisasi perlu ada peningkatan, tertib anggaran dalam proses perencanaan, dan tepat waktu dalam realisasi.	4 Dalam hal pengeluaran daerah keseluruhan realisasi telah sesuai dengan mata anggaran masing-masing belanja, adapun bila masih ada koreksi, saran dan masukan akan kami tindaklanjuti.

5.	Pada masa pandemi covid-19, Kabupaten Rembang menjadi daerah zona merah, maka penggunaan APBD harus memprioritaskan pelayanan kesehatan, pelayanan publik, menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan secara efektif dan efisien.	Kami sepakat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Realisasi penyerapan anggaran Belanja, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mengoptimalkan kinerja OPD-OPD terkait untuk penyerapan anggaran tersebut, sehingga tidak terjadi keterlambatan penyerapan	1 Akan kami perhatikan.
2.	Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menambah fasilitas-fasilitas penunjang Kesehatan, seperti penambahan tempat isolasi mandiri, pengadaan SWAB dan RAPID test yang lebih sering dan merata, serta memaksimalkan pemerataan vaksinasi di Wilayah Kabupaten Rembang.	2 Pemerintah Kabupaten Rembang sudah menambah fasilitas penunjang kesehatan.
3.	Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih mensosialisasi masyarakat akan bahaya dan dampak yang timbul jika melanggar protocol kesehatan yang sudah diterapkan, bila perlu pemberian sanksi bagi pelanggar aturan protocol kesehatan.	3 Terkait masukan atau pandangan tersebut, sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI DEMOKRAT HANURA	
1.	Penyerapan anggaran belum maksimal karena masih ada sisa anggaran yang belum terserap pada beberapa OPD	1. Lihat jawaban kami pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
2.	Penanganan covid-19 di Kabupaten Rembang dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada	2. Lihat jawaban kami pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA	
1.	<p>Buku LHP BPK agar disampaikan ke DPRD. tidak ada lagi pembahasan di DPRD mengenai LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK. Bahkan kami tidak lagi menerima naskah atau buku LHP tersebut, sehingga kami tidak mengetahui secara persis seberapa jauh predikat WTP tersebut maupun apa saja yang menjadi rekomendasi BPK kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon diberi buku LHP BPK tsb. sebagai referensi kami menjalankan fungsi DPRD.</p>	<p>1. Pengiriman LHP BPK R. Idilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD.</p>
2.	<p>Dari sisi pendapatan daerah kita bisa mencapai target penerimaan yakni 100,57 %, dari rencana Rp. 1.867.686.369.423,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.878.325.918,50. Lebih menggembirakan lagi PAD (pendapatan asli daerah) dari rencana Rp. 292.142.773.423,00 bisa terealisasi sebesar Rp. 326.670.124.350,50 atau 111,82 %. Harapan kami pada tahun mendatang kita bisa melampaui target pendapatan, terutama pendapatan asli daerah. Untuk itu, kami sangat mendukung upaya BPPKAD maupun OPD yang lain untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.</p>	<p>2. Terimakasih atas dukungannya</p>
3.	<p>Mengenai DID (dana insentive daerah), kami berpendapat rendahnya alokasi DID yg diberikan pemerintah pusat sebagai reward atas opini WTP, menunjukkan Pemkab Rembang kurang konsen terhadap poin-poin yang merupakan parameter pemberian DID. Mohon penjelasan!</p>	<p>3. Pada tahun 2019 Pemkab Rembang telah memperoleh banyak prestasi yang mendukung perolehan DID sampai dengan 91 M prestasi yang sama sulit dicapai pada tahun 2020 karena situasi pandemi dimana alokasi APBD sebagian besar digunakan untuk penanganan covid, meskipun dengan keterbatasan anggaran demikian Pemkab senantiasa berupaya untuk mencapai prestasi pada sektor-sektor pendukung DID</p>
4.	<p>angka SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) dalam pelaksanaan APBD TA 2020 sebesar Rp. 65,3 milyar lebih, padahal tahun lalu hanya Rp 35 milyar.</p>	<p>Silpa sebesar 65,3 m terdiri Kas BUD sebesar 59,9 M sisanya di BLUD dan BOS</p>

	Mohon penjelasan!	
5.	Banyaknya rangkap jabatan dan plt di lingkup Pemkab Rembang menandakan adanya tata kelola pemerintahan yang tidak pro pelayanan kepada rakyat. Mohon penjelasan !	Kebijakan ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dimana bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada tidak diperkenankan untuk melakukan Mutasi dan Promisi
6.	Mencermati kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai prioritas pembangunan yg ditetapkan dalam RKPD 2020 maka terdapat prioritas pembangunan yg tidak tercapai yakni peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya IPM (indeks pembangunan manusia) pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 0,13% dari angka 70,15 pada tahun 2019 turun ke angka 70,02 pada tahun 2020. Bagaimana agar Pemerintah Kabupaten Rembang lebih fokus lagi terhadap bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat ini, mohon penjelasan.	Pemerintah Kabupaten Rembang selalu komitmen dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, secara makro kami telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sekurang-kurangnya 25% dari pagu APBD Kabupaten Rembang setiap tahunnya. Terkait dengan penurunan prosentase pada kinerja derajat kesehatan masyarakat, secara nyatadisebabkan adanya wabah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda dan masih dilakukan pemutusan rantai penyebaran virus dimaksud.
7.	Masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sebesar 15,6 %, relatif masih tinggi dan belum memenuhi target, untuk itu diperlukan evaluasi secara komprehensif.	Evaluasi komprehensif telah kami lakukan melalui pemenuhan alokasi anggaran untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi serta disokong oleh Perangkat Daerah yang lain selama memiliki hubungan linier dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
8.	Hampir semua OPD melaporkan capaian kegiatan dan serapan anggaran lebih dari 90 %. Tapi ternyata hal ini tidak memberikan dampak yang signifikan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Rembang, terlihat dari belum tercapainya beberapa indikator utama yakni kemiskinan, pengangguran, daya beli, dan nasib petani dan nelayan. Ini menandakan Pemkab abai dan tidak serius dalam dalam penggunaan anggaran. Mohon penjelasan !	Perlu kami informasikan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Presiden R.I beserta Jajaran Kementerian memerintahkan agar Pemerintah Daerah serius dalam mengalokasikan anggaran untuk Covid 19, tindaklanjut yang kami lakukan adalah melaksanakan Recofusing dan Realokasi Anggaran pada masing-masing seluruh OPD di Kabupaten Rembang, yang diperuntukkan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Covid 19, secara tidak langsung porsi

		<p>untuk mensejahterakan petani dan nelayan akan kami prioritaskan pada APBD mendatang.</p>
9.	<p>Petani kembali menjerit dan menderita. Harga gabah saat panen jatuh dan pupuk sulit didapat saat masa tanam bisa kembali terulang. Pemkab seperti lepas tangan. Mohon penjelasan !</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, dalam rangka penambahan dropping Pupuk bersubsidi untuk Petani, terkait dengan kelangkaan pupuk secara riil di lapangan tidak terjadi, karena Petani telah memiliki Kartu Tani sebagai dasar penebusan dan pengambilan Pupuk Bersubsidi. Adapun harga gabah yang relatif jatuh disebabkan oleh kapasitas Bulog dalam menyerap dan membeli gabah petani disesuaikan dengan kuota yang ditarget oleh Pemerintah Pusat.</p>
10.	<p>Perencanaan anggaran dengan tanpa prioritas menyebabkan tidak jelasnya capaian hasil atas pembangunan. Ini menandakan Pemkab tidak peka dengan permasalahan yang ada sehingga pembangunan berjalan apa adanya, tanpa kejelasan arah dan tujuan. Mohon penjelasan !</p>	<p>Dalam hal Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun KUA-PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, alur penyusunan KUA-PPAS telah melalui tahapan yang panjang antara lain pelaksanaan Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangkab sebagai dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen KUA-PPAS dan PERDA tentang APBD</p>
11.	<p>Tercapainya target investasi di Rembang (Rp. 9 T) ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, bahkan angka kemiskinan cenderung naik. Ini menandakan bahwa Pemkab tidak cermat menentukan bentuk investasi yang dibutuhkan di Rembang. Mohon penjelasan!</p>	<p>Investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang telah direncanakan dan dihitung secara detail, secara langsung investasi tersebut menguntungkan karena mampu meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Setoran Laba Investasi, yang dikembalikan dalam wujud pelaksanaan kegiatan untuk prioritas pengentasan kemiskinan.</p>
12.	<p>Rencana pembangunan Pasar Kota Rembang selalu menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. Ini menandakan Pemkab kurang matang dan tegas dalam perencanaan tata kota. Mohon penjelasan !</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pasar Kota Rembang tetapi beberapa kali para Pedagang tersebut selalu membuat petisi Penolakan Pembangunan Pasar Kota Rembang, mediasi telah dilakukan tetapi para pedagang tidak berkenan dan menolak.</p>

13	<p>Masih adanya keluhan dari para nelayan atas rumitnya pengurusan surat menyurat kapal, serta masih tertundanya pembayaran hasil lelang, yang menyebabkan kerugian keuangan para nelayan, menandakan Pemkab tidak serius dalam memperjuangkan nasib para nelayan, padahal mereka telah memberikan kontribusi retribusi yang tidak sedikit kepada Pemkab. Mohon penjelasan !</p>	<p>Pemerintah Kabupaten sebatas memberikan fasilitasi. Terkait dengan pengurusan surat – menyurat dan penerbitan dokumen layar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
14	<p>Adanya pengurangan penerima bantuan sosial , ekonomi, dan kesehatan dari pemerintah yg tdk diiringi dengan penjelasan dari desa, mengesankan adanya ketidakadilan, yg menimbulkan banyak pertanyaan dan kegundahan di masyarakat. Mohon penjelasan !</p>	<p>Besaran Bantuan Sosial merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat yang langsung ke masyarakat.</p>
15	<p>Dibidang infrastruktur, masih belum tercapainya kondisi jalan tanpa lubang di Kabupaten Rembang saat ini menjadi kendala tersendiri, karena jalan merupakan salah satu pendukung untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi sistem peningkatan dan pemeliharaan jalan agar penataan jalan bisa lebih baik. Petanyaan kami, bagaimana strategi terbaik agar kondisi jalan di Kabupaten Rembang bisa dalam kondisi baik?</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyediakan alokasi anggaran yang cukup, namun dengan wabah Covid-19 anggaran tersebut direcofusing untuk penanggulangan Covid-19, selanjutnya dalam penyusunan APBD di tahun mendatang, Pembangunan Jalan kami prioritaskan.</p>
16	<p>Kita prihatin terhadap kondisi sungai Babagan, karena terjadi pencemaran. Sungai penuh dengan sampah plastik, ada kasur, kemungkinan juga ada limbah industri dan lain sebagainya. Sepertinya Pemerintah belum bisa mengatasi problem kebersihan lingkungan sehingga Kabupaten Rembang belum bisa mendapatkan Penghargaan Adipura. Diperlukan program terobosan agar bisa mrnjadikan lingkungan yang bersih serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi problem tersebut?</p>	<p>Tindakan yang telah kami lakukan adalah memberikan sosialisasi melalui Camat Lasem bersama aparat Pemerintah Desa di Sepadan aliran Sungai Babadan, langkah nyata selanjutnya adalah akan kami sediakan Kontainer sampah sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah disungai.</p>
17	<p>Berkaitan dengan Program Lasem Kota Pusaka, mohon penjelasan progres penataan kawasan Lasem kota pusaka, karena kita sudah melihat para pedagang sudah membongkar semua barang dagangannya dan pembangunan di Terminal Lasem akan</p>	<p>Progres Pembangunan Lasem Kota Pusaka saat ini tahap penyelesaian DED selanjutnya percepatan Dokumen AMDAL kami kejar sehingga pembangunan segera dilaksanakan.</p>

	digunakan untuk apa?	
18	Pada sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Justru dimasa pandemi kita mendapati merebaknya tempat2 hiburan illegal, salah satunya di sepanjang jalan raya di antara desa Landoh - Sulang. Hal ini mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Semestinya segera diambil tindakan tegas untukmengantisipasi penyebaran covid serta penyebaran penyakit masyarakat. Mohon penjelasan	Berulang kali telah kami tindak warung-warung dimaksud, selanjutnya akan kami tindak lebih tegas dan pemberian sangsi akan kami terapkan.
19	Meledaknya kasus Covid 19 yang tidak diimbangi dengan ketercukupan bantuan logistik kepada mereka yang isolasi menandakan Pemkab kurang tanggap atas bencana pandemi yang ada. Mohon penjelasan !	Secara nyata kami telah menganggarkan bantuan logistic sebesar Rp. 1.260.000.000 dan mampu mencakup masyarakat di Kabupaten Rembang.
20	Mohon keterangan sejelas jelasnya mengenai kelangsungan Pelabuhan "Tanjung Bonang" di Sluke.	Sambil menunggu penyelesaian klaim investasi oleh investor, pengelolaan tanah pelabuhan hasil reklamasi dilakukan berdasarkan SKB Bupati Rembang, Kapolres Rembang, Kajari Rembang dan Ka UPP Kelas III Rembang, Perbup Penugasan kepada PT RBSJ dan peraturan direksi PT RBSJ terbatas pada pemeliharaan dan layanan jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa.
21	Terakhir kami berharap, setiap perencanaan proyek atau kegiatan hendaknya disusun secara matang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara proyek atau kegiatan tsb. sehingga tidak terjadi proyek atau kegiatan yang mangkrak. Disamping itu perencanaan yang kurang matang mengakibatkan proyek atau kegiatan-kegiatan yang numpuk di akhir tahun anggaran sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan.	Terima kasih, saran dan masukan kami perhatikan.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : PEDIAS YUDITH P, S.H.
2. Jabatan : Kabag. Rapat Risalah dan Perundang - Undangan

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<u>: 30 orang</u>

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<u>: 14 orang</u>

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati

- TAPD Kabupaten Rembang, dan Sekretaris DPRD beserta staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kehadiran-Nya, atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 24 Juni 2021 kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam membahas Rancangan Perda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku pada Rapat Paripurna Kedua hari ini, adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama tanggal 14 Juni 2021 dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 30 orang. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat telah terpenuhi, dan dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.37 WIB Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.e

Sebelum berlanjut ke acara pokok, akan saya sampaikan susunan acara pada rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

4. Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Pendapat akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. untuk menyampaikannya.

===== LAPORAN BANGGAR =====

Terimakasih Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas bantuannya.

➤ (*Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara ketiga yaitu Pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020. Untuk kelancaran dalam penyampaiannya, kepada juru bicara masing-masing fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sumardi
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Nasirudin,S.Si.
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdri. Sumarsih
5. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Agus Purnawan Y.A.Md.
6. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Agus Sutrisno

Secara berurutan, dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

PENDAPAT FRAKSI

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓		
Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ (*Pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keempat yaitu Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Dari laporan Badan Anggaran maupun pendapat masing-masing Fraksi, sudah dapat disimpulkan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dapat disetujui. Namun untuk keabsahannya, perlu persetujuan secara lesan dari rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Catatan yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJU=====

(Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan memperhatikan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta atas dasar persetujuan dari anggota, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan berikut penyerahan surat keputusan. Disilahkan.

===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA =====

Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memandu jalannya penandatanganan bersama.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

Terima kasih saudara H. Abdul Hafidz, S.Pd.I. atas penyampiannya.

➤ (*Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020*)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda pada rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna Kedua ini. Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang telah disetujui bersama ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Sebelum saya

akhiri, perlu kami sampaikan bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kemarin, Sekretariat DPRD telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Amanat Pasal 127 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, dan pada ayat (2), pengucapan sumpah/janji dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD. Oleh karena pada rapat Badan Musyawarah tanggal 10 Juni 2021, agenda pengucapan sumpah/janjih ini belum diagendakan, maka perlu merubah agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah tanggal 10 Juni 2021. Mengingat agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara anggota pada rapat paripurna ini.

“ Apakah disetujui untuk merubah agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 10 Juni 2021 ?“

===== SETUJUUUU =====

(*Ketuk palu 1 kali*)

Terimakasih rekan-rekan atas persetujuannya. Dari persetujuan ini, setelah selesai rapat paripurna, saya minta kepada Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah untuk melakukan penjadwalan kembali.

Akhirnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

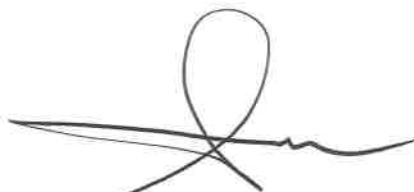
Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat ini.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

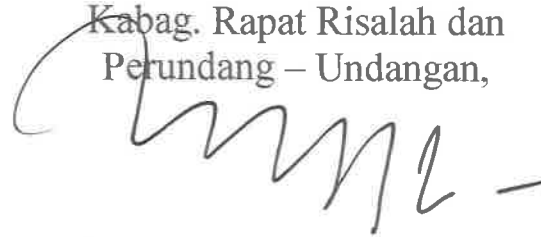
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI

An. SEKRETARIS DPRD
Kabag. Rapat Risalah dan
Perundang – Undangan,



PEDIAS YUDITH P, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19631113 199402 1 001

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pj. Sekda Kabupaten Rembang dan Tim TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor⁸ Tahun 2021 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020

HARI/TANGGAL : KAMIS, 24 JUNI 2021
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45			45

Keterangan :



- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN PJ SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 24 JUNI 2021

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
2	EDY SUPRIYANTA, ATD,S.H.,M.M.	Pj. Sekertaris Daerah	2.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG





Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 24 JUNI 2021

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDY SUPRIYANTA, ATD,S.H.,M.M.	Pj. Sekertaris Daerah	1.
2		Asisten I Sekda	2.
3		Asisten II Sekda	3.
4		Asisten III Sekda	4.
5	MUSTAWIR	Ka. BPPKAD	5.
6		Ka. BAPPEDA	6.
7		Kabag. Hukum Setda	7.
8		Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8.
9		Kabag. Pemerintahan Setda	9.
10	Isminarto Budi S	BPPKAD	10.
11	Denny Budi		11.
12	Ceciw Candikowati		12.
13			13.
14			14.
15	Moh. Rizki Hidayat	Musman	15.


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Dr. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

LAPORAN BADAN ANGGARAN

DALAM RAPAT PARIPURNA

PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG TA. 2020



REMBANG, 24 JUNI 2021

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Perbup No. 54 Th. 2019 ttg Penjabaran APBD TA. 2020;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perbup No. 47 Th. 2020 ttg. Penjabaran Perubahan APBD TA. 2020

12. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
13. Surat Bupati Rembang Nomor 900/1264/2021, tanggal 9 Juni 2021 perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ;
14. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 10 Juni 2021 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

III. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Juni 2021 Jam 12.25 WIB dengan acara Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
2. Rapat Badan Anggaran dengan Tenaga Ahli yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021 Jam 12.15 WIB dengan acara Bedah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020.
3. Rapat Badan Anggaran dengan OPD pada tanggal 17, 18 dan 21 Juni 2021 Jam 09.00 WIB, dengan acara Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
4. Rapat Badan Anggaran dengan Bank Jateng Cabang dan Perusda di Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juni 2021 Jam 11.00 WIB, dengan acara Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terkait Pendapatan Daerah .
5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada tanggal 22 Juni 2021 Jam 12.15 WIB, dengan acara Sinkronisasi pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
6. Rapat Badan Anggaran DPRD tanggal 23 Juni 2021 Jam 10.00 WIB, dengan acara Penyusunan Laporan Banggar atas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan . Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PENDAPATAN	1.867.686.369.423,00	1.878.325.919.915,50	10.639.550.492,50	100,57	1.878.325.919.915,50	0,00	100,57	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	292.142.773.423,00	326.670.124.350,50	34.527.350.927,50	111,82	326.670.124.350,50	0,00	111,82	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	80.026.500.000,00	87.544.136.466,00	7.517.636.466,00	109,39	87.544.136.466,00	0,00	109,39	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.721.396.775,00	16.368.148.360,00	1.646.751.585,00	111,19	16.368.148.360,00	0,00	111,19	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.309.000,00	11.961.666.343,00	1.121.357.343,00	110,34	11.961.666.343,00	0,00	110,34	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.554.567.648,00	210.796.173.181,50	24.241.605.533,50	112,99	210.796.173.181,50	0,00	112,99	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.022.967.423.000,00	1.012.352.994.244,00	-10.614.428.756,00	98,96	1.012.352.994.244,00	0,00	98,96	
1.2.1	Dana Transfer Umum	787.373.341.000,00	781.268.636.918,00	-6.104.704.082,00	99,22	781.268.636.918,00	0,00	99,22	
1.2.2	Dana Transfer Khusus	235.594.082.000,00	231.084.357.326,00	-4.509.724.674,00	98,09	231.084.357.326,00	0,00	98,09	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	552.576.173.000,00	539.302.801.321,00	-13.273.371.679,00	97,60	539.302.801.321,00	0,00	97,60	
1.3.1	Pendapatan Hibah	71.595.695.000,00	71.702.592.717,00	106.897.717,00	100,15	71.702.592.717,00	0,00	100,15	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.622.999.000,00	97.043.873.316,00	-8.579.125.684,00	91,88	97.043.873.316,00	0,00	91,88	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	356.270.479.000,00	356.270.479.000,00	0,00	100,00	356.270.479.000,00	0,00	100,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.087.000.000,00	14.285.856.288,00	-4.801.143.712,00	74,85	14.285.856.288,00	0,00	74,85	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	BELANJA	1.898.661.797.240,00	1.830.776.504.959,20	-67.885.292.280,80	96,42	1.830.776.504.959,20	0,00	96,42	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.207.714.292.445,00	1.179.233.499.336,00	-28.480.793.109,00	97,64	1.179.233.499.336,00	0,00	97,64	
2.1.1	Belanja Pegawai	645.866.898.955,00	622.214.863.606,00	-23.652.035.349,00	96,34	622.214.863.606,00	0,00	96,34	
2.1.2	Belanja Bunga	1.631.632.000,00	1.110.103.113,00	-521.528.887,00	68,04	1.110.103.113,00	0,00	68,04	
2.1.3	Belanja Subsidi	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	0,00	100,00	6.600.000.000,00	0,00	100,00	
2.1.4	Belanja Hibah	87.141.810.000,00	83.857.142.000,00	-3.284.668.000,00	96,23	83.857.142.000,00	0,00	96,23	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.079.720.000,00	3.782.220.000,00	-297.500.000,00	92,71	3.782.220.000,00	0,00	92,71	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.357.333.100,00	12.357.333.100,00	0,00	100,00	12.357.333.100,00	0,00	100,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	392.677.638.587,00	392.584.621.600,00	-93.016.987,00	99,98	392.584.621.600,00	0,00	99,98	
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	57.359.259.803,00	56.727.215.917,00	-632.043.886,00	98,90	56.727.215.917,00	0,00	98,90	
	Belanja Tidak Turut						0,00		
2.2	BELANJA LANGSUNG	690.947.504.795,00	651.543.005.623,20	-39.404.499.171,80	94,30	651.543.005.623,20	0,00	94,30	
2.2.1	Belanja Pegawai	233.014.829.668,00	228.249.231.303,00	-4.765.598.365,00	97,95	228.249.231.303,00	0,00	97,95	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.892.922.125,00	269.170.333.462,20	-10.722.588.662,80	96,17	269.170.333.462,20	0,00	96,17	
2.2.3	Belanja Modal	178.039.753.002,00	154.123.440.858,00	-23.916.312.144,00	86,57	154.123.440.858,00	0,00	86,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-30.975.427.817,00	47.549.414.956,30	78.524.842.773,30	-153,51	47.549.414.956,30	0,00	-153,51	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			PEMBAHASAN					
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%					
									3	4	5	6	7
1	2												
3	PEMBIAYAAN DAERAH												
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.143.795.817,00	68.525.861.116,80	-51.617.934.700,20	57,04	68.525.861.116,80	0,00	57,04					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.143.795.817,00	40.143.475.816,80	-320.000,20	100,00	40.143.475.816,80	0,00	100,00					
3.1.1.7	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah	80.000.000.000,00	28.382.385.300,00	-51.617.614.700,00	35,48	28.382.385.300,00	0,00	35,48					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	89.168.368.000,00	50.750.095.000,00	-38.418.273.000,00	56,91	50.750.095.000,00	0,00	56,91					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	0,00	100,00	5.300.000.000,00	0,00	100,00					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	83.868.368.000,00	45.450.095.000,00	-38.418.273.000,00	54,19	45.450.095.000,00	0,00	54,19					
	PEMBIAYAAN NETTO	30.975.427.817,00	17.775.766.116,80	-13.199.661.700,20	57,39	17.775.766.116,80	0,00	57,39					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	65.325.181.073,10	65.325.181.073,10	0,00	65.325.181.073,10	0,00	0,00					

B. CATATAN :


1. Dalam hal belanja daerah realisasinya mencapai 96,42 % itu bagus sekali, tetapi belanja tersebut belum berdampak pada outcome dan impact pada masyarakat, hal ini bisa dilihat pada perolehan DID dimana Tahun Anggaran 2021 hanya memperoleh DID sebesar Rp. 7.370.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu hanya di bidang peningkatan ekspor saja. Padahal di Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Rembang memperoleh DID sebesar Rp. 91.193.188.000,- (Sembilan puluh satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan penganggaran belum berjalan dengan baik, kedepan anggaran belanja didorong untuk dapat memenuhi kriteria DID agar dapat memperoleh DID yang tinggi, yaitu outcome dan impact harus bisa dirasakan oleh masyarakat.
2. Kedepan, supaya TAPD menggunakan alokasi anggaran dari DID sesuai dengan ketentuan peruntukannya agar bisa mendapatkan lagi dana dari jalur prestasi.
3. Persyaratan teknis pencairan dana sebesar 2,3 M untuk penyelamatan pangan yang ada di Bank Rembang agar di permudah sehingga dapat segera dilaksanakan.
4. PT. Rembang Migas Energi selama ini mengandalkan bagi hasil dari pusat untuk operasional, tidak mempunyai usaha yang lebih produktif, ibaratnya diam sudah mendapatkan bagi hasil dari pusat, mohon kedepan lebih progresif agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
5. Agar ada payung hukum yang jelas dalam perekrutan Tenaga Harian Lepas, termasuk juga penataannya.
6. Agar ada upaya Penataan kota dengan baik sehingga dapat dijadikan icon Kabupaten Rembang

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna II (dua) DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 24 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN

Ketua

H. SUPADI

Sekretaris,

Drs. DRUFODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KABUPATEN REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2020



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis , 24 Juni 2021

Dibacakan oleh : SUMARDI , SE



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2020
DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Kamis , 24 Juni 2021
Dibacakan oleh : SUMARDI , SE

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh.....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , Assholatu wassalamu a'laa Rosulillah , Wa a'la alihi Washohbihi wamanwalah..., Laa haula Walaa quwwata Illabillah..., Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- sdr. Pj Sekretaris Daerah , Staf Ahli , Asisten Sekretaris Daerah , Kepala Badan, Kepala Dinas , Kepala Kantor , dilingkungan Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang dimulyakan oleh ALLAH SWT.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan hadir, dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal aflat.

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020, dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyandang predikat WTP yang ke tiga kali, meskipun dari hasil pembahasan, masih banyak adanya catatan kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan, terutama untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Kami sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Mulai dari Penyampaian nota keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, oleh sdr. Bupati pada rapat Paripurna I, dan juga jawaban pandangan umum dari Fraksi-fraksi, yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati pada rapat Paripurna ke I juga, pada hari senin, tanggal 14 Juni 2021 yang lalu, sampai pada Pembahasan ditingkat Banggar bersama TAPD, dan juga dilakukan pendalaman pembahasan oleh Banggar bersama Tenaga Ahli, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami sampaikan, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan dari hasil pembahasan, sebagai berikut :

- 1 Dalam upaya penanganan Covid guna untuk memutus mata rantai virus tersebut kami dari fraksi partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah melakukan isolasi terpusat Mandiri.

- 2 Dalam rangka optimalisasi pemenuhan PAD dari retribusi TPI, mohon agar Pemkab Rembang memberikan bantuan personil dari Satpol PP, untuk pengawasan agar lebih tertib dan aman.
- 3 Untuk kegiatan Fisik dan sarana prasarana tahun anggaran 2020 , namun belum terlaksana , dan sudah ada yang dilaksanakan namun belum terbayarkan , mohon supaya dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2021.
- 4 Dalam rangka mendukung Program Bappeda yaitu terlaksananya Aplikasi One Map Infratraktur terpadu , dimohon agar semua OPD mensupport kelengkapan data-data yang dibutuhkan oleh Bappeda.
- 5 Untuk mencukupi kebutuhan Air bersih dan mengatasi kekeringan di Rembang , perlu Pembangunan Penampungan air baku, untuk kebutuhan hal tersebut , untuk itu diminta agar DPU TARU melakukan Konsultasi dan komunikasi dengan BBWS Pemali Juwana atau BBWS Bengawan Solo.
- 6 Dalam melaksanakan kegiatan hendaknya dipersiapkan T-1 (1 Tahun) Anggaran sebelumnya.
- 7 Terkait dengan ruas jalan Dresi - Krikilan yang sekarang ini dipakai Operasional kendaraan BAG dan RME. Karena tidak sesuai dengan kelas jalan , maka untuk pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pengguna jalan (PT BAG dan RME)
- 8 Terkait dengan program UMKM dan ketahanan Pangan yang sampai saat ini masih rendah serapannya, agar dapat sesuai yang direncanakan mohon agar OPD terkait melakukan sosialisasi dan mempermudah persyaratan pengajuan.
- 9 Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mohon dan mengusulkan kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk mempersiapkan penyusunan dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2021, dan KUA / PPAS APBD Induk 2022 , untuk segera ditindak lanjuti , dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati , menelaah dan mengevaluasi hasil pembahasan , terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 secara keseluruhan , melalui pendapat akhir ini menyampaikan , dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI** ” RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2020 ini , untuk **DITETAPKAN MENJADI** “ PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2020.

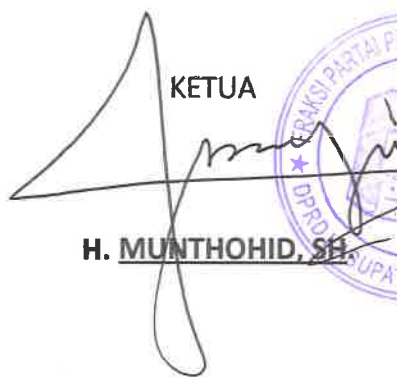
Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2020.

Trima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq...., Wassalamu a'laikum Wr..... Wb.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 24 Juni 2021

KETUA

H. MUNTHOHID, SE



SEKRETARIS

H. SUNARDI. Spd. I.



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2020

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 24 Juni 2021.

Assalamu 'alaikum wb. wb.

Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati, segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang.

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di Lingkungan Pemkab Rembang serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali pendapat fraksi ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul kiyamah nanti, amin.

Hadirin Sidang Dewan yang kami Muliakan.

Selanjutnya kami dari FPKB mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan Pendapat FPKB terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020
2. Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang telah menyampaikan laporan atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020.

Hadirin Sidang Dewan yang kami Muliakan

Setelah mendengar laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020, yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran pada tanggal 24 Juni 2021, FPKB bisa memahami laporan tersebut. Namun demikian, FPKB memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, saran, rekomendasi, ataupun pernyataan terkait Ranperda ini, sebagaimana berikut :

1. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), FPKB menilai apabila dilihat dari sisi angka realisasi memang cukup bagus karena mampu melampaui target yang telah direncanakan. Namun FPKB memberi catatan bahwa peningkatan PAD pada APBD 2020 ini banyak disupport oleh BLUD RSUD. Dr. R. Soetrasno

dan 16 BLUD puskesmas dan disertai penurunan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi Daerah. Menurut hemat kami, seharusnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi harus naik dari tahun ke tahun karena kenaikan jumlah obyek wajib pajak dan obyek retribusi. Maka, FPKB merekomendasikan agar Pemkab melakukan langkah-langkah strategis guna mendongkrak PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Besaran alokasi Dana insentif Daerah yang diterima Pemkab Rembang pada TA 2020 menggambarkan penilaian Pemerintah Pusat atas capaian kinerja Pemkab Rembang dalam mengelola keuangan dan kesehatan fiskal Daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Maka, terhadap bidang-bidang yang belum mendapatkan nilai optimal, FPKB merekomendasikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh atas akar permasalahannya. Apakah permasalahannya karena kebijakan yang kurang tepat atau karena kinerja OPD yang membidangi yang kurang maksimal dalam bekerja atau disebabkan hal lain.
3. Percepatan Pembangunan Daerah tentu tidak cukup hanya mengandalkan belanja dari APBD saja apalagi dengan APBD yang pendapatannya pas-pasan dan nyaris habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Maka, FPKB merekomendasikan Pemkab Rembang agar lebih kreatif dan aktif berupaya untuk mendapatkan dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Komunikasi intensif dengan kementerian yang membidangi sektor pembangunan tertentu harus dijalin agar Kabupaten Rembang masuk skala prioritas pembangunan oleh Pemerintah Pusat.

Hadirin Sidang Dewan yang kami Muliakan.

Demikian beberapa rekomendasi dari kami, dan dengan mengucapkan Bismilahirrahmanirrahim, FPKB menyatakan **Dapat Menerima dan menyetujui** “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020“ untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang .

Hadirin Sidang Dewan yang kami Muliakan.

Demikian pendapat Akhir FPKB ini disampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamit thorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 24 Juni 2021

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



Ilyas

Ketua



Nasirudin, S.Si

Sekretaris



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pendapat Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, ijin kami dari Fraksi NasDem menyampaikan pendapat fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Pendapat Fraksi ini bertujuan mengambil pelajaran dari pelaksanaan APBD 2020 untuk perbaikan di masa mendatang, walaupun terdapat masukan, saran dan kritik semuanya untuk pembangunan Rembang yang lebih baik.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijin kami menyampaikan Pendapat Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan PAD dalam bidang pariwisata terutama pengelolaan kawasan makam RA. Kartini dan Pantai Kartini perlu dikelola dengan baik agar bisa memberikan kontribusi.
2. Pemerintah Daerah harus mengambil langkah strategis dalam mengelola potensi-potensi PAD. Pengelolaan kekayaan dan asset daerah menjadi sangat penting, potensi PAD kita sebetulnya banyak, akan tetapi belum terkelola dan diurus dengan maksimal.
3. Pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu jalan antar kecamatan dan jalan antar desa masih banyak yang rusak. Untuk itu harus diprioritaskan penyelesaiannya karena menunjang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan seluruh warga Rembang.
4. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda atau tidak terealisasi akibat dampak covid-19, agar dilaksanakan kembali sebagai prioritas utama ditahun berikutnya.

5. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu Fraksi NasDem memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Rembang.
6. Kami menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda.

Demikian Pendapat Fraksi ini kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 24 Juni 2021

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



H. MASHADI, S.Pd., M.M.



PDI PERJUANGAN

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Pada Tanggal : 24 JUNI 2021



FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212 Telp. (0295)6911494



PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

Hari / Tanggal : Kamis 24 Juni 2021

Dibacakan oleh :

Bismillahirrohmannirohim

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Yang terhormat, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang,

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi ini, marilah kita bersama mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukurkehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Pertama-tama kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, tak lupa juga kami memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Banggar, TAPD, serta Tenaga Ahli yang telah bekerja keras dalam pendalaman, sinkronisasi dan penyusunan laporan atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 ini sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Terkait dengan hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa catatan, yaitu sebagai berikut :

- Yang pertama, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang atas pencapaian kinerjanya sehingga dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ketiga kalinya. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dapat mempertahankan opini tersebut pada tahun-tahun yang akan datang dengan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur keuangan daerah serta peningkatan kemampuan, ketrampilan dan moral para aparatur pemerintahannya.

- Kedua, setelah melakukan pembahasan bersama dengan anggota Banggar, tenaga ahli dan TAPD terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, kami mengevaluasi agar nanti kedepannya dengan adanya sistem proses perencanaan yang sudah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) diharapkan semua kegiatan nantinya dapat terencana serta berjalan dengan efektif dan efisien pada triwulan pertama, dengan begitu Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, pemeliharaan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan mengevaluasi kinerja SKPD-SKPD nya.
- Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk dapat sesegera mungkin menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI dan berkoordinasi dengan SKPD-SKPD terkait untuk segera melakukan rencana aksi (perbaikan atau penyesuaian) yang telah diberikan sehingga dapat mengoptimalkan manfaat yang akan diperoleh untuk Daerah.
- Yang Terakhir, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi Covid-19 melalui pemerintah desa dengan menggunakan anggaran dana desa, dilaksanakan dengan mengedukasi secara langsung dan menjangkau seluruh masyarakat dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, harapannya masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang tepat tentang bahaya dan cara pencegahan Covid-19.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Demikianlah beberapa catatan dari kami, selanjutnya dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohiim" kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan ***Dapat Menerima dan Menyetujui*** Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktivitas ditengah situasi pandemic wabah *Covid-19* ini, serta tak lupa untuk terus berdo'a agar situasi pandemic wabah *Covid-19* ini segera berakhir. Aamiin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,
Merdeka...Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT- HANURA
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2020**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

REMBANG, 24 JUNI 2021

DIBACAKAN OLEH : AGUS PURNAWAN YULIANTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 RembangTelp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
DIBACAKAN OLEH : AGUS PURNAWAN YULIANTO**

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab. Rembang
3. FORKOMPINDA Kabupaten Rembang
4. Staff ahli Bupati, Asisten Sekertaris Daerah, Kepala badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang
5. Saudara Pj. Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang bersama Staf
6. Saudara pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, Rekan2 wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kepada kita semua Rahmat dan HidayahNya dengan penuh kebahagiaan sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi semoga mendapat hasil dan keputusan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Dan kami juga tidak bosan-bosannya mengajak hadirin berdoa supaya virus Covid19 ini cepat berlalu dimana saat ini di Rembang sudah sangat banyak masyarakat yang terpapar Covid19.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah melalui proses pembahasan Banggar beserta OPD terkait kami mengapresiasi proses pembahasan berjalan lancar karena antara Banggar dan OPD berjalan dengan baik dan kami mengucapkan kepada anggota Banggar semoga mendapat imbalan di dunia maupun di akhirat.

Dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ini adalah merupakan bagian dari Pertanggung jawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam laporan keuangan agar Pemerintah Kabupaten Rembang bisa melihat hal-hal yang perlu diperbaiki untuk proses penganggaran di tahun berikutnya.

Dengan mengucap Bismilahirrohmanirrohim kami Fraksi Demokrat-Hanura Menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Dalam kesempatan yang baik ini Fraksi Demokrat-Hanura memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti.

1. Fraksi Demokrat-Hanura berharap dalam kondisi Covid19 saat ini supaya pemerintah Daerah jangan terlalu memberatkan pelaku usaha untuk memberikan pajak demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Agar semua program pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat agar di permudah karena masyarakat sangat membutuhkan.
3. Agar tidak terjadi lagi kelebihan-kelebihan pembayaran dengan pihak ke-III, kami berharap supaya PPK dan OPD harus jeli dalam melakukan verifikasi suatu kegiatan
4. Pemerintah Kabupaten Rembang harus tertib dalam penatausahaan asset sehingga tidak timbul sengketa/kehilangan asset.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik supaya dilaksanakan diawal anggaran dan jangan sampai terakhir dimana hasilnya tidak maksimal.
6. Kami berharap supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dapat meningkatkan taraf hidup pelaku seni dimasa pandemi saat ini.
7. Pemerintah Daerah harus cermat dalam sewa pemanfaatan asset Daerah supaya jangan kehilangan asset milik Daerah tersebut.

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara. Bupati, wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 24 Juni 2021

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA  **SEKRETARIS** 
MUGIYARTO S.T.  **DUMADIYONO, S.H.**



**PENDAPAT
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

terhadap

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KAB. REMBANG TA 2020**

**DISAMPAIKAN DLM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG
HARI KAMIS LEGI, 24 JUNI 2021
JURU BICARA: AGUS SUTRISNO**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Yang terhormat Sdr Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan para hadirin sekalian.

Mengawali pendapat fraksi kali ini, selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas musibah pandemi covid yang menimpa bangsa Indonesia saat ini. Bahkan Kabupaten Rembang berpredikat “zona merah”, dengan angka yang cukup fantastis. Informasi dari Gugus Tugas Covid Kabupaten Rembang pertanggal 23 Juni 2021 jam 16.00 kemarin, total saat ini ada 5056 kasus dengan tambahan dalam sehari sejumlah 113 kasus. Sedang total yang meninggal sudah 424 korban dan kasus aktif yang masih dalam perawatan baik di ruang isolasi khusus maupun isolasi mandiri sebanyak 671 pasien. Marilah senantiasa kita berdoa ke hadirat Alloh SWT semoga cobaan ini segera berakhir.

Dalam hal yang lain, Fraksi KIS mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membuat aplikasi di media sosial yang bernama “SiWaspada” yakni aplikasi sistem informasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Rembang yang ingin menyampaikan aduan maupun aspirasi melalui DPRD, kini tidak perlu susah-susah lagi. Keluhan tersebut dapat langsung dikirim secara online menggunakan HP android kemudian direspons oleh anggota DPRD.

Saudara Bupati dan hadirin sekalian.

Membahas pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD itu sama dengan “ngoyak kidang minglar” mengejar kijang yang lari artinya membahas sesuatu yang telah berlalu.

Setelah melakukan pembahasan yang cukup hangat dalam Rapat Badan Anggaran dengan TAPD dan OPD, tibalah saatnya Fraksi Karya Indonesia

Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan Pendapat Akhir atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Saudara Bupati beberapa waktu yang lalu.

Pada awal rapat ini, Badan Anggaran DPRD telah menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan pembahasan dan pendalaman Banggar dengan TAPD dan OPD tidak ditemukan perbedaan secara momitatif (angka), artinya pertanggungjawaban Bupati sudah bisa diterima oleh DPRD. Namun demikian ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Rembang, antara lain:

1. Capaian peningkatan PAD yang melampaui target walau dalam kondisi pandemi Covid 19 patut diapresiasi, prestasi ini harus terus dipertahankan untuk tahun anggaran yang akan datang.
2. Berbagai temuan pemeriksaan BPK hendaknya menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang dimasa mendatang, kami juga mendorong agar temuan temuan yang didapat segera ditindaklanjuti untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan Pemkab atas temuan BPK.
3. Adanya program pinjaman di BKK Lasem dan Bank Rembang yang belum optimal agar segera diambil langkah teknis yang lebih mudah dijalankan, sehingga semangat perbaikan ekonomi dapat segera diwujudkan.
4. Optimalisasi pembayaran retribusi di TPI perlu segera dilakukan dengan peningkatan pengawasan terpadu berbagai pihak sehingga PAD dapat terus ditingkatkan.
5. Perlu langkah antisipasi terjadinya kondisi terburuk akibat lonjakan penderita Covid 19 ; penambahan ruang isolasi terpusat dan perawatan di rumah sakit, obat2an, tabung oksigen, dan tenaga kesehatan.

Perlu arah kebijakan yang lebih jelas terkait pelaksanaan vaksinasi agar dapat segera meningkat cakupannya, sesuai dengan target pemerintah pusat.

6. Dengan prestasi hattrick opini WTP (wajar tanpa pengecualian) Pemkab Rembang 3 tahun berturut turut, kedepan bisa dipertahankan dengan disertai capaian-capaian kinerja dari semua OPD sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor DID (dana insentif daerah). Perlu diketahui bahwa perolehan DID tahun ini sangatlah minim, karena perolehan skor (nilai) cuma dari peningkatan ekspor saja yang notabene berasal dari swasta.

Sementara itu belanja modal kesehatan, pendidikan dan kemandirian daerah nilainya E alias jeblok. Selain itu pelayanan dasar publik bidang pendidikan yang meliputi angka partisipasi murni, peta mutu pendidikan nilainya belum memenuhi harapan.

Untuk pelayanan dasar publik bidang kesehatan juga belum menyumbang angka yang menggembirakan,

Pelayanan dasar publik di bidang Infrastruktur yang meliputi akses sanitasi layak dan sumber air minum layak, hasilnya masih dibawah harapan.

Bidang kesejahteraan masyarakat yang katagorinya ada IPM (indeks pembangunan manusia), penurunan angka pengangguran, penurunan penduduk miskin juga perlu diperhatikan, agar kedepan bisa dicapai sesuai harapan pemerintah pusat.

Sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, Sistem Akuntabilitaa Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Investasi nilainya juga belum memuaskan.

7. Sampai dengan tutup buku tahun 2020 masih terdapat piutang macet yang cukup besar dan meningkat dibanding tahun 2019, hal ini diduga bahwa piutang macet yang lama belum tertagih, malah ketambahan piutang macet yang baru ditahun 2020. Untuk itu kami merekomendasikan agar terus dilakukan upaya yang serius dalam menyelesaikan piutang-piutang tersebut sehingga tidak membebani neraca daerah dan pemerintah daerah segera dapat memanfaatkan untuk dipergunakan dalam menambah belanja daerah dan membiayai pembangunan.

Tahun

8. Prosentase Belanja Modal sejak tahun 2016 sampai 2020 jumlahnya selalu turun, tahun 2020 kemarin belanja modal hanya Rp.154 milyar. Padahal harusnya belanja modal itu selalu naik. Pada dasarnya peningkatan belanja modal akan mempercepat pertumbuhan aset daerah secara langsung.

Untuk itu Fraksi KIS merekomendasikan agar kebijakan peningkatan alokasi belanja modal pada kelompok belanja langsung APBD setiap tahunnya hendaknya terus meningkat.

Berapa persinya?

Berdasarkan studi anggaran, untuk Pemerintah Provinsi idealnya belanja modal sebesar 15 - 20 %, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar 30 % dari APBD. Jadi idealnya Kabupaten Rembang yang APBD-nya sebesar Rp.1,8 T maka belanja modalnya dikisaran Rp. 300 - 500 milyar sampai kebutuhan infrastruktur dasar publik tersebut cukup, standar dan memadai.

Marilah kita bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan mensejahterkan masyarakat dengan diikuti program dan kegiatan dari semua pihak, agar out come-nya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Rembang

Saudara Bupati dan hadirin sekalian

Demikianlah pendapat akhir kami, dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 Kabupaten Rembang ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 Kabupaten Rembang.

Sebelum turun dari mimbar ini kami ingin mengutip sebuah piweling dari orang tua kita dahulu sbb:

“Kahanan ndonya iki ora langgeng, tansah mobah mosik. Yen sira lagi ketunggon bandha lan kasinungan pangkat, aja banjur rumangsa “*sapa sira sapa ingsun*”, ngendel-endelake panguwasa tumindak deksura marang sapa-dha-padha. Elinga yen bandha iku gampang sirna, pangkat lan drajat bisa oncat ing saben wayah”.

Artinya: Keadaan dunia ini tidak pernah tetap, selalu berubah. Kalau sedang ditunggu kekayaan pangkat dan derajat, jangan pernah merasa “siapa kamu siapa saya” selalu menunjukkan kekuasaannya, bertindak semaunya pada sesama. Ingatlah bahwa harta itu bisa habis, pangkat dan jabatan bisa lepas sewaktu-waktu.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Terima kasih - Wassalamu'alaikum wr. wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,



AGUS SUTRISNO

Sekretaris,



PUDJI SANTOSA, SP, MH



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA
PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020
Tanggal, 24 Juni 2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Untuk Kita semua

- Ykh. - Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Para Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- Ykh. - Para Ketua Partai Politik, Rekan-rekan Wartawan, LSM, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur *Alhamdulillah*, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka **“Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD beserta unsur pimpinan, dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah menunjukkan keseriusannya, mengedepankan sikap arif dan bijaksana dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah kita lalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hari ini telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semua tanggapan, apresiasi, kritik, saran, dan pendapat yang disampaikan masing-masing fraksi maupun Komisi DPRD selama pembahasan akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan terhadap masyarakat. Pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran.

Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan DPRD akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terkait hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan memperbaikinya pada proses perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya.

Sedangkan hal yang sudah baik kami akan pertahankan, bahkan akan kami tingkatkan lagi, untuk mencapai visi kabupaten Rembang yaitu **“Terwujudnya Rembang Gemilang Tahun 2026”**

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakekatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas-

tugas dan program yang sudah dikerjakan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2020 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Daerah dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Forkopimda, Kepala OPD, pimpinan partai politik, wartawan, LSM, dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta buah karya dan hasil kerja keras kita bersama.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Demikian Pendapat Akhir atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2020, yang telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Kabupaten Rembang.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah, dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 24 Juni 2021;
2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 24 Juni 2021;
3. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 24 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Juni 2021.

Ketua,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang



SUPADI